

# **Implementasi Penerapan SAK EMKM serta Dampaknya pada Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Se Kota Semarang)**

AGUNG PRAJANTO

IRA SEPTRIANA

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro  
Jl. Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul, Kota Semarang Jawa Tengah  
Email: agungpraja12@gmail.com**

**Diterima 27 Agustus 2018; disetujui 3 September 2018**

***Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan besaran kredit yang diterima oleh UMKM, serta prospek penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ditahun 2017, serta dampaknya pada kualitas pelaporan keuangan UMKM. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dengan menggunakan alat kuesioner dengan responden adalah pengusaha UMKM di wilayah Kota Semarang sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pengusaha akan laporan keuangan masih sangat rendah sehingga mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pengusaha UMKM tidak berpengaruh pada besaran kredit yang diperoleh UMKM. Prospek impelementasi SAK EMKM terhadap kualitas pelaporan keuangan saat ini masih sangat minim karena pengusaha masih rendah dalam memahami pembukuan sesuai dengan SAK EMKM.*

***Keywords:** Laporan Keuangan, UMKM, Kredit, SAK EMKM.*

## **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang.** Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selain itu peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 57%. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional ini dihitung menurut harga yang berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp 4.321,8 triliun atau 58,05% sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.869,5 triliun atau 59,08% (Bank Indonesia, 2015).

Jumlah UMKM yang semakin meningkat selama beberapa tahun menimbulkan persoalan

klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha. Pemerintah mencatat, pada tahun 2014, dari 56,4 juta UMK yang ada diseluruh Indonesia, baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Dari prosentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% mengakses dari non bank termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.

Pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan pembiayaan kepada UMKM yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target yang ditetapkan pemerintah atas penyaluran KUR pada tahun 2016 sebesar Rp 100-120 triliun dengan suku bunga yang dibebankan kepada debitur sebesar 9% efektif per tahun. Jumlah penyaluran tersebut merupakan peningkatan yang besar pada periode

sebelumnya yang hanya disalurkan paling banyak Rp 40 Triliun. Tujuan dari KUR menurut Permenko No.8 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat salah satunya adalah meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Informasi akuntansi yang akuntabel dan transparan akan mempermudah persyaratan bagi para pelaku usaha UMKM dalam mengajukan pinjaman kepada lembaga pembiayaan. Namun dalam pelaksanaannya praktek tersebut sangat sulit dilakukan mengingat laporan keuangan bukan sesuatu yang penting dalam kelancaran proses usaha mereka. Berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah latar belakang pendidikan yang tidak paham akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi serta, tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan tenaga akuntan, Rizki (2012).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2016 telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK ini berlaku efektif bulan agustus 2016 terbitnya SAK ini mengakomodir penerapan SAK sebelumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sebelum tahun 2016 entitas UMKM dipersilahkan untuk menggunakan SAK ETAP namun karena efisiensi dan efektivitas pemakaian untuk entitas yang lebih kecil maka penggunaan SAK ETAP menjadi tidak relevan. Untuk itu diterbitkanlah SAK EMKM sebagai standar yang khusus mengatur pelaporan keuangan entitas UMKM. Diharapkan dengan SAK EMKM ini akan lebih memudahkan lagi para pelaku usaha UMKM dalam membuat pembukuan atau akuntansi untuk pelaporan keuangan dibandingkan dengan SAK ETAP.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki (2012) yang menguji kualitas pelaporan UMKM dan prospek SAK ETAP. Penelitian ini mencoba mereplikasi dan mengembangkan penelitian sebelumnya dan mengetahui sejauh mana implementasi SAK terbaru dari yaitu SAK EMKM.

## TINJAUAN TEORETIS

**Definsi Usaha Kecil Menengah.** Beberapa penulis buku tentang Usaha Kecil Menengah mendefinisikan pengertian UKM dan Industri Kecil adalah sebagai berikut:

- a. M. Tohar mendefinisikan perusahaan kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Tohar, 2001,1)
- b. *Financial Accounting Standard Board* (FASB) dalam Ahmed Riahi Balkaoui, mendefinisikan perusahaan kecil sebagai berikut. Sebuah perusahaan kecil yang operasinya relatif kecil, biasanya dengan pendapatan total kurang dari \$5 juta.
- c. Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, usaha menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
- d. Menurut Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

**Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).** Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2016, menyusun SAK EMKM sebagai standar laporan keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP

(Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

Dalam SAK EMKM, Laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil maupun menengah, serta konsep entitas bisnis. Laporan keuangan entitas terdiri dari: Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

**Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan SAK EMKM.** Laporan keuangan yang disajikan menurut SAK EMKM memiliki tujuan yang sama dengan laporan keuangan pada umumnya. Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (IAI, 2013).

**Kerangka Pemikiran.** Pada era modernisasi saat ini banyak UMKM yang hanya melakukan pencatatan jumlah kas masuk dan kas keluar, jumlah barang yang diperoleh dan diserahkan ke konsumen serta tagihan dan kewajiban dari UMKM. Format pencatatan yang dibuat oleh UMKM tersebut belum menunjukkan format keuangan yang baku sebagai pelaku usaha. Adanya tuntutan dari pihak eksternal seperti perbankan untuk membuat laporan keuangan menjadikan pelaku usaha mencoba mengkaryakan ahli akuntansi. Namun mereka beranggapan bahwa dengan merekrut tenaga akuntansi akan menambah biaya operasional dan mungkin akan mengganggu perhitungan untung rugi UMKM.

Muniarti (2002) dalam Rizki (2012), meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 283 pengusaha kecil dan menengah. Ditemukan bahwa karakteristik pemilik/manajer (masa memimpin, pendidikan formal manajer/

pemilik, dan pelatihan akuntansi yang diikuti manajer/pemilik), serta karakteristik perusahaan kecil dan menengah (umur perusahaan, sektor industri dan skala usaha) secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi dan perusahaan.

Menurut Rizki (2012), terdapat beberapa hal yang diduga dapat mempengaruhi persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha seperti jenjang pendidikan terakhir latar belakang pendidikan, ukuran usaha serta lama usaha berdiri.

Jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan menyerap pengetahuan baru (Gray 2006; Van Hermert et al 2011). Muniarti (2002) menemukan bahwa pengusaha dengan jenjang pendidikan formal yang rendah cenderung tidak memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai dibandingkan pengusaha yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi.

Pinasti (2011) menemukan bahwa ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. Ukuran perusahaan yang besar berimplikasi perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga mampu mempekerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik.

Lama suatu usaha berdiri memberikan pengaruh terhadap pengusaha UMKM mengenai SAK EMKM. Umur usaha yang semakin panjang, memberikan keuntungan dalam hal telah mempunyai struktur dan proses yang rutin yang mendisiplinkan setiap tindakan perusahaan. Termasuk dalam proses tersebut adalah proses pembukuan.

**Hipotesis.** Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1a: jenjang Pendidikan terakhir berpengaruh positif terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan.

H1b: Latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya.

H1c: Ukuran usaha berpengaruh positif terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya.

H1d: Lama usaha berdiri berpengaruh positif terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan.

Hasil survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan beberapa kendala internal yang menyebabkan beberapa pembiayaan UMKM sebesar 60%-70% belum terserap dan belum mendapatkan akses perbankan. Diantara penyebabnya adalah kendala administratif, seperti system pembukuan yang masih manual dan tradisional. Pengelolaan keuangan belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

Menurut Baas dan Shrooten (2006) dalam Rizki (2012) bahwa salah satu teknik pemberian kredit yang paling banyak digunakan adalah *financial statement lending* yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi keuangan dari debiturnya. Namun disisi lain hal tersebut menjadi kendala tersendiri sebab UMKM tidak mampu menyediakan informasi keuangan. Rizki (2012) menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan masih tergolong rendah, rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap besarnya jumlah kredit/termin kredit yang diterimanya.

Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan terkait dengan jumlah kredit yang diberikan perbankan ke UMKM:

H2a : Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap jumlah kredit perbankan yang diterima oleh UMKM.

H2b : Ukuran usaha berpengaruh positif terhadap jumlah kredit perbankan yang diterima oleh UMKM

H2c : lama usaha berdiri berpengaruh positif terhadap jumlah kredit perbankan yang diterima oleh UMKM

H2d : besaran jaminan berpengaruh positif terhadap jumlah kredit perbankan yang diterima oleh UMKM

H2e : Termin kredit berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit perbankan yang diterima oleh UMKM

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki (2012) telah menguji tentang pemberian informasi dalam laporan keuangan UMKM dengan menggunakan SAK ETAP telah menunjukkan bahwa pemahaman terhadap SAK ETAP masih sangat lemah hal ini menunjukkan sosialisasi masih sangat minim. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menguji pemahaman dengan menggunakan SAK EMKM. hipotesis yang ditujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3a : Pemberian Informasi dan Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK EMKM

H3b : Jenjang pendidikan terakhir pengusaha berpengaruh positif terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK EMKM

H3c : latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK EMKM.

H3d : Ukuran usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK EMKM

H3e : Lama berdiri usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK EMKM

## METODE PENELITIAN

**Populasi dan Sampel.** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan populasi sekitar 40 pengusaha UMKM yang terdapat di wilayah Semarang dan Sekitarnya. Pemilihan sampel diambil dengan melakukan pengamatan yang mempunyai skala usaha yang tidak terlalu besar.

**Jenis dan Sumber Data.** Jenis penelitian ini adalah penelitian primer dimana penelitian dilakukan langsung dengan wawancara langsung atau menggunakan kuesioner. Sumber data diperoleh dengan cara mendatangi atau mengirimkan kuesioner kepada responden. Didalam kuesioner akan diajukan beberapa pertanyaan terkait dengan

variabel yang akan diuji.

**Metode Pengumpulan Data.** Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian. Metode yang digunakan adalah menggunakan wawancara dan kusioner. Wawancara digunakan untuk mencari informasi tentang perkembangan UMKM selaku pihak yang memediasi antara UMKM dengan pihak yang peneliti.

**Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel.** Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Persepsi Pengusaha UMKM (PERSP).** Persepsi pengusaha UMKM merupakan variabel yang merepresentasikan pandangan dari pengusaha UMKM terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan UMKM terhadap perkembangan usaha mereka. Pengukuran menggunakan skala 1-4 (dari sangat tidak penting atau jika tidak menjawab sampai sangat penting).

Jumlah kredit yang diterima UMKM

Poin yang diberikan atas jawaban dari pertanyaan ini adalah

1. untuk kredit kurang dari Rp10.000.000,
2. untuk (Rp10.000.001– Rp25.000.000),
3. untuk Rp25.000.001– Rp50.000.000,
4. untuk Rp50.000.001 – Rp100.000.000, serta
5. untuk kredit lebih dari Rp100.000.000.

**Pemahaman terkait SAK EMKM (PAHAM).** Variabel ini dihitung dengan menilai jawaban responden atas pertanyaan berikut:

1. Apakah Bapak / Ibu cukup memahami isi dari SAK EMKM?
  - a. Ya (jika Ya, tolong jelaskan dengan singkat terkait isi SAK EMKM tersebut)
  - b. Tidak
2. Apakah Bapak / Ibu mengetahui perbedaan antara PSAK dengan SAK EMKM?
  - a. Ya (jika Ya, tolong jelaskan dengan singkat)
  - b. Tidak

Jika menjawab Ya, akan mendapat nilai antara 1-5 tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan dan yang menjawab Tidak akan mendapat poin 0.

**Jenjang Pendidikan Terakhir (PDDK\_JJG).** Pemahaman yang lebih baik mengenai SAK EMKM dapat dipengaruhi dari jenjang pendidikan

yang lebih tinggi. Pengukuran untuk variabel ini adalah 1 jika pendidikan lebih rendah dari SMA/SMK, 2 jika mempunyai pendidikan SMA/SMK, 3 jika S1, 4 untuk jenjang pendidikan S2, serta 5 jika berpendidikan S3.

**Latar Belakang pendidikan (PDDK\_LTR).** Jika mempunyai latar belakang pendidikan Akuntansi diberi nilai 3, sedangkan jika berlatar belakang pendidikan Manajemen dan Ekonomi diberi nilai 2, serta untuk latar belakang pendidikan lainnya (termasuk jika berlatar belakang pendidikan SMA) mendapat nilai 1.

**Ukuran usaha (SKALA).** Ukuran usaha ditentukan berdasarkan jumlah karyawan, total aset, dan nilai penjualan. Berikut adalah pertanyaan dan pilihan jawaban untuk mengetahui ukuran usaha:

1. Jumlah Karyawan:
  - a. < 4 orang;
  - b. 5 – 19 orang,
  - c. 20 – 99 orang, d. e” 100 orang
2. Aset Perusahaan:
  - a. < dari Rp 100 juta,
  - b. Rp 100 juta – Rp 499 juta,
  - c. Rp 500 juta – Rp 2.5 miliar,
  - d. > dari Rp 2.5 miliar
3. Penjualan Perusahaan:
  - a. < dari Rp 100 juta,
  - b. Rp 100 juta – Rp 499 juta,
  - c. Rp 500 juta – Rp 2.5 miliar,
  - d. > dari Rp2.5 miliar

Masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawaban “a”, 2 untuk jawaban “b”, 3 untuk “c”, dan “4” untuk “d”. Nilai dari ketiga pertanyaan dijumlahkan dan berdasarkan hasil penjumlahan tersebut ukuran usaha dikelompokkan menjadi kelompok usaha mikro untuk nilai antara 1 – 4, usaha kecil antara 5 – 8, dan untuk nilai  $\geq 9$  tergolong usaha menengah.

**Lama Berdirinya Usaha (USIA).** Lama berdirinya usaha menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian suatu usaha baik oleh perbankan maupun investor, sebab dari usia usaha ini dapat diketahui *business stage* dari usaha tersebut beserta *track record* dari usaha yang dijalani selama ini. Nilai 1 diberikan jika lama usaha adalah 1 tahun, kemudian 2 untuk lama usaha berdiri antara 1 tahun hingga 3 tahun, dan 3 untuk lama usaha berdiri lebih dari 3 tahun.

**Kualitas Laporan Keuangan UMKM (KUALTS\_LK).** Dalam penelitian ini, indeks kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan:

1. Pelaku UMKM melakukan pembukuan akuntansi atau tidak, jika menjawab “Ya” maka mendapat poin 1, dan 0 untuk jawaban “Tidak”.
2. Terdapatnya bagian atau divisi atau pegawai khusus dalam perusahaan yang bertanggung jawab terkait pembukuan dan pelaporan keuangannya, poin 1 diberikan jika menjawab “Ada” dan 0 untuk jawaban “Tidak”.
3. Terdapatnya *software* akuntansi yang mendukung pembukuannya, poin 1 diberikan jika menjawab “Ya” dan 0 untuk jawaban “Tidak”.
4. Awal laporan keuangan pertama kali dibuat. Nilai diberikan sesuai dengan jumlah tahun dari awal laporan keuangan dibuat hingga tahun 2010.
5. Rutin atau tidaknya pembukuan transaksi serta pelaporan keuangan dibuat, jika menjawab “Rutin” mendapat poin 1 dan 0 untuk jawaban “Tidak”.
6. Standar akuntansi yang digunakan, jika menjawab pilihan jawaban “PSAK”, atau “Aturan Perpajakan” atau “Lainnya” mendapat poin 1, dan poin 0 untuk jawaban “Tidak Tahu”.
7. Komponen laporan keuangan yang akan dibuat (terdapat 5 komponen laporan keuangan). Dapat menjawab lebih dari 1 pilihan dan masing-masing pilihan memiliki poin 1, dengan poin maksimal adalah 5. Poin yang didapat dari masing-masing pertanyaan tersebut dijumlahkan sehingga mendapat angka indeks kualitas laporan keuangan.

**Jumlah kredit yang diterima (KREDIT).**

Merupakan besarnya nilai kredit yang diterima oleh pengusaha dari perbankan. Poin yang diberikan pertanyaan ini adalah

1 untuk kurang dari Rp10.000.000, 2 untuk Rp 10.000.001 – Rp 25.000.000), 3 untuk Rp 25.000.001 – Rp 50.000.000, 4 untuk Rp 50.000.001 – Rp 100.000.000, serta 5 untuk lebih dari Rp100.000.000.

**Jaminan Kredit (JAMIN).** Merupakan nilai aset yang dimiliki pengusaha yang dijadikan jaminan dalam pengajuan kreditnya. Poin yang diberikan untuk jawaban atas pertanyaan ini adalah 1 bila

tidak ada jaminan, 2 untuk jaminan kurang dari Rp10.000.000, 3 untuk Rp10.000.001–Rp25.000.000, 4 untuk Rp50.000.001–Rp100.000.001, dan 5 untuk lebih dari Rp100.000.000.

**Termin Kredit (JKW).** Merupakan jangka waktu yang diberikan kepada UMKM untuk dapat membayar atau melunasi pinjaman kreditnya. Nilai yang diberikan atas jawaban dari pertanyaan ini adalah 1 untuk termin kredit kurang dari 1 tahun, 2 untuk termin kredit > 1 tahun hingga 3 tahun, dan 3 untuk termin kredit lebih dari 3 tahun.

**Informasi dan Sosialisasi (INFO).** Merupakan usaha yang dilakukan dari IAI dan lembaga lainnya dalam proses sosialisasi terkait SAK EMKM. Variabel ini diukur dari penjumlahan nilai dari jawaban yang diberikan untuk pertanyaan berikut:

1. Memiliki pengetahuan sebelumnya terkait SAK EMKM, jika menjawab “Ya” mendapat poin 1, dan jika “Tidak” mendapat poin 0.
2. Sumber informasi yang didapat terkait SAK EMKM. Terdapat 4 pilihan jawaban (Seminar/ Pelatihan, Internet, Buletin/ Majalah, Lainnya (sebutkan). Setiap pilihan jawaban atas pertanyaan ini mendapat poin 1.
3. Apakah pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan tentang SAK EMKM, jika menjawab “Ya” maka mendapat poin 1 dan 0 untuk jawaban “Tidak”.

**Metode Analisis Data.** Berikut ini adalah model penelitian yang mereplikasi dari penelitian Rizki (2012) terdiri dari model 1 untuk menguji Hipotesis H1, model 2 menguji hipotesis H2, dan model 3 menguji hipotesis H3:

Model 1:

$$\text{PERSPS} = \alpha_1 + \alpha_2 \text{PDDK\_JJG}_i + \alpha_3 \text{PDDK\_LTR}_i + \alpha_4 \text{SKALA}_i + \alpha_5 \text{USIA}_i + e_i$$

Model 2:

$$\text{KREDIT} = \beta_1 + \beta_2 \text{KUALTS\_LK}_i + \beta_3 \text{SKALA}_i + \beta_4 \text{USIA}_i + \beta_5 \text{JAMIN}_i + \beta_6 \text{JKW}_i + e_i$$

Model 3:

$$\text{PAHAM}_i = \gamma_1 + \gamma_2 \text{INFO}_i + \gamma_3 \text{PDDK\_JJG}_i + \gamma_4 \text{PDDK\_LTR}_i + \gamma_5 \text{SKALA}_i + \gamma_6 \text{USIA}_i + e_i$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Uji Hipotesis Model 1.** Dilihat dari tabel 1, nilai probabilitas signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,320 yang lebih besar dari taraf nyata (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi berpengaruh tidaknya jenjang pendidikan (PDDK\_JJG), latar belakang pendidikan (PDDK\_LTR), ukuran usaha (SKALA) dan usia (USIA) terhadap persepsi (PERSP) pengusaha akan pentingnya laporan keuangan.

Hasil pengujian model 1 secara parsial pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa variabel jenjang pendidikan (PDDK\_JJG) tidak berpengaruh positif terhadap persepsi penyusunan laporan keuangan. (H1a ditolak). Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian besar responden berada pada jenjang sekolah SMA/SMK dengan latar belakang keilmuan non akuntansi. Keadaan inilah yang menimbulkan jenjang sekolah tidak mempengaruhi persepsi penyusunan laporan keuangan. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang juga menunjukkan jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi penyusunan laporan keuangan.

Hasil pengujian model 1 secara parsial pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa variabel jenjang pendidikan (PDDK\_JJG) tidak berpengaruh

positif terhadap persepsi penyusunan laporan keuangan. (H1a ditolak). Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian besar responden berada pada jenjang sekolah SMA/SMK dengan latar belakang keilmuan non akuntansi. Keadaan inilah yang menimbulkan jenjang sekolah tidak mempengaruhi persepsi penyusunan laporan keuangan. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang juga menunjukkan jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi penyusunan laporan keuangan.

Ukuran usaha (SKALA) tidak berpengaruh positif terhadap persepsi pengusaha (H1b ditolak). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh mayoritas responden yang masih dalam skala usaha mikro dan kecil sehingga beranggapan bahwa pembukuan dan pelaporan keuangan belum terlalu penting. Hal ini sejalan dengan hasil keuisoneer yang menunjukkan bahwa 25 responden belum melakukan pembukuan. Namun tidak konsisten dengan pengujian yang dilakukan oleh Rizki (2012) yang menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran UMKM maka kebutuhan informasi keuangan akan sangat penting.

Variabel lama usaha (USIA) tidak berpengaruh positif terhadap persepsi penyusunan laporan keuangan (H1c) ditolak. Keadaan ini menunjukkan bahwa usia perusahaan yang muda menunjukkan persepsi penyusunan laporan keuangan menjadi semakin besar sedangkan usia yang semakin tua menunjukkan persepsi penyusunan yang semakin

**Tabel 1**  
**Hasil Uji F Model 1**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.114	4	.279	1.221	.320 <sup>a</sup>
	Residual	7.986	35	.228		
	Total	9.100	39			

a. Predictors: (Constant), USIA, PDDK\_JJG, SKALA, PDDK\_LTR

b. Dependent Variable: PERSP

**Tabel 2**  
**Hasil Uji t Model 1**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.352	.380		11.446	.000
	PDDK_JJG	.053	.195	.048	.269	.789
	PDDK_LTR	-.117	.110	-.197	-1.067	.293
	SKALA	-.049	.058	-.141	-.843	.405
	USIA	-.187	.107	-.306	-1.751	.089

a. Dependent Variable: PERSP

kecil. Hal ini juga konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang menunjukkan hasil negatif signifikan.

Variabel latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi persepsi pengusaha UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. (H1d ditolak). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh mayoritas responden yang memiliki pendidikan diluar akuntansi dan ekonomi sehingga menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan tidak begitu penting serta tidak perlu dilakukan secara teratur. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rizki (2012) dimana latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi persepsi penyusunan laporan keuangan.

**Uji Hipotesis Model 2.** Dilihat dari tabel Uji F diatas, nilai probabilitas signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf nyata (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi berpengaruh tidaknya aset yang dijamin (JAMIN), jangka waktu (JKW), ukuran usaha (SKALA), kualitas laporan keuangan (KUALTS\_LK) dan usia (USIA) terhadap kredit yang diberikan (KREDIT).

Hasil pengujian model 2 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima (H2a ditolak). Hal ini mungkin disebabkan karena kualitas laporan keuangan mungkin belum dijadikan sebagai alat oleh

perbankan untuk merealisasikan kredit kepada UMKM. Kemungkinan lebih melihat pada jumlah omzet dan kebutuhan modal kerja yang ingin digunakan oleh UMKM. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kredit yang diterima.

Variabel skala usaha berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang diterima (H2b diterima). Hal ini konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang menunjukkan bahwa perbankan lebih memperhatikan skala usaha sebagai bahan pertimbangan dalam pencairan kredit. Usia usaha berdiri (USIA) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang dicairkan (H2c ditolak). Hal ini dikarenakan perbankan tidak melihat usia entitas sebagai media untuk mencairkan kredit. Lama usaha ataupun baru berdiri tidak mempengaruhi besaran kredit yang diterima. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang menunjukkan bahwa usaha yang lama berdiri akan mendapatkan kredit yang cukup besar dari perbankan, karena risiko usahanya lebih kecil dibandingkan dengan yang baru berdiri.

Besaran Jaminan yang diberikan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kredit yang diterima (H2d diterima). Hal ini konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang menunjukkan bahwa besaran kredit yang diterima dipengaruhi oleh besaran aset yang dijamin oleh UMKM.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji F Model 2**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	284.010	5	56.802	49.060	.000 <sup>a</sup>
Residual	39.365	34	1.158		
Total	323.375	39			

a. Predictors: (Constant), JKW, USIA, KULTS\_LK, SKAL, JAMIN

b. Dependent Variable: KREDIT

**Tabel 4**  
**Hasil Uji t Model 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.599	.662		-2.416	.021
KULTS_LK	-.053	.110	-.032	-.481	.634
SKALA	.526	.137	.258	3.840	.001
USIA	-.070	.236	-.019	-.297	.768
JAMIN	1.126	.218	.645	5.170	.000
JKW	.637	.350	.216	1.822	.077

a. Dependent Variable: KREDIT

Variabel jangka waktu kredit tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima (H2e ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama jangka waktu kredit tidak mempengaruhi besaran kredit yang diterima oleh UMKM

**Uji Hipotesis Model 3.** Dilihat dari tabel 5, nilai probabilitas signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,837 yang lebih besar dari taraf nyata (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi berpengaruh tidaknya jenjang pendidikan (PDDK\_JJG), latar belakang pendidikan (PDDK\_LTR), ukuran usaha (SKALA) dan informasi (INFO) terhadap pemahaman pengusaha UMKM atas SAK EMKM.

Variabel informasi dan sosialisasi (INFO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pengusaha UMKM atas SAK EMKM (H3a Ditolak). Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan sosialisasi akan SAK EMKM hal ini terlihat bahwa 52% responden belum pernah mengetahui tentang SAK EMKM. Selain itu latar belakang pendidikan yang responden yang sebagian besar adalah SMA/SMK dan tidak berasal dari bidang akuntansi dan ekonomi menjadikan informasi akan SAK EMKM tidak terlalu penting bagi responden. Namun berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden masih menganggap perlu adanya sosialisasi SAK EMKM karena

responden sebagian besar menjawab bahwa pembukuan masih sangat penting. Hasil ini tidak konsisten dengan pengujian yang dilakukan oleh Rizki (2012) yang menunjukkan pengaruh positif informasi terhadap pemahaman SAK ETAP.

Variabel latar belakang pendidikan (PDDK\_LTR) tidak berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK EMKM (H3b ditolak). Hal ini sesuai jumlah responden yang sebagian besar berlatar belakang non akuntansi dan ekonomi sehingga membutuhkan waktu lama untuk memahami pembukuan. Pengujian ini konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang menunjukkan hasil yang sama dengan menggunakan pemahaman SAK ETAP.

Variabel selanjutnya adalah jenjang pendidikan (PDDK\_JJG) tidak berpengaruh terhadap pemahaman SAK EMKM (H3c ditolak). Hal ini dikarenakan jenjang pendidikan responden yang berasal dari SMA/SMK dan berlatar belakang non akuntansi dan ekonomi. Variabel USIA dan SKALA tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman SAK EMKM (H3d dan H3e ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama dan semakin besar UMKM belum pasti mempengaruhi pemahaman SAK EMKM. UMKM yang sudah lama berdiri dan telah mencapai skala besar belum tentu berkeinginan untuk memahami SAK EMKM dengan baik. Sedangkan pada UMKM yang baru berdiri dan berusia masih muda cenderung berupaya

**Tabel 5**  
**Hasil Uji t Model 3**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.559	5	.112	.412	.837 <sup>a</sup>
Residual	9.216	34	.271		
Total	9.775	39			

a. Predictors: (Constant), USIA, PDDK\_JJG, INFO, SKALA, PDDK\_LTR

b. Dependent Variable: PAHAM

**Tabel 6**  
**Hasil Uji t Model 3**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.450	.424		1.061	.296
INFO	-.106	.174	-.107	-.608	.547
PDDK_LTR	.090	.138	.140	.649	.521
PDDK_JJG	-.226	.222	-.198	-1.017	.316
SKALA	-.021	.066	-.060	-.322	.749
USIA	.120	.124	.196	.972	.338

a. Dependent Variable: PAHAM

untuk mencari cara untuk membesarkan omzet usahanya dan berupaya agar usahanya tetap berjalan dari pada memahami pembukuan dengan pemahaman SAK EMKM. Pengujian ini sama dengan hasil dari Rizki (2012) yang menyimpulkan hasil yang sama untuk variabel jenjang pendidikan, usia dan skala dengan menggunakan pemahaman SAK ETAP.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rencana implementasi SAK EMKM di tahun 2017 untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan masih belum berjalan dengan lancar. Mengingat pemahaman dan persepsi pengusaha akan pentingnya laporan keuangan masih sangat minim. Para pelaku usaha cenderung berupaya bagaimana melakukan pengembangan usaha daripada melakukan penataan pembukuan sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini juga konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang saat itu menggunakan SAK ETAP juga menunjukkan bahwa SAK ETAP juga belum bisa diimplementasikan pada UMKM.

## SIMPULAN

**Simpulan.** SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang disusun untuk mengakomodir para pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan dengan baik dan benar. Latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, ukuran usaha dan lama berdirinya perusahaan tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha dalam melakukan pembukuan dan cenderung berpengaruh negatif. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM cenderung ingin memperluas bisnisnya dan melakukan upaya agar usaha tetap dijalankan daripada melakukan pembukuan dengan baik dan benar.

Besaran pencairan kredit yang diberikan oleh perbankan cenderung tidak dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan, hal ini terlihat pada hasil pengujian yang menunjukkan pengaruh negatif. Besaran kredit yang diberikan oleh perbankan cenderung dipengaruhi oleh besaran Jaminan dan skala bisnis.

Persepsi pengusaha atas SAK EMKM masih sangat rendah hal ini terlihat pada kurangnya informasi yang sangat minim tentang SAK EMKM. Latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan

juga tidak berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha atas SAK EMKM. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan responden dan jenjang pendidikan yang sebagian besar adalah lulusan SMA/SMK dan dari latar belakang non ekonomi akuntansi. Keadaan tersebut menjadikan responden tidak begitu memahami tentang standar akuntansi. Skala usaha dan lamanya usaha berdiri juga tidak mempengaruhi pemahaman pengusaha atas SAK EMKM. Hal ini dikarenakan UMKM yang sudah lama berdiri cenderung tidak memperhatikan pembukuan dan UMKM yang baru berdiri lebih mengutamakan peningkatan omzet dan kelangsungan bisnis daripada memahami sistem pembukuan sesuai SAK EMKM. Keadaan ini menunjukkan harapan dari SAK EMKM untuk menciptakan pembukuan yang sederhana bagi para UMKM masih belum terwujud secara baik.

Penelitian ini juga menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian Rizki (2012) yang mengambil model dengan menggunakan SAK ETAP. Beberapa pengujian menunjukkan bahwa baik itu memakai SAK ETAP maupun SAK EMKM, para pelaku UMKM masih belum memahami tentang penggunaan SAK untuk penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa semua variabel belum menunjukkan signifikansi yang positif untuk menguji kelayakan SAK ETAP dan SAK EMKM yang diterapkan oleh UMKM.

Keterbatasan penelitian ini adalah masih rendahnya kesadaran responden dalam melakukan pembukuan yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman dan pentingnya pembukuan bagi bisnis mereka. Hal ini mengakibatkan pengujian atas beberapa model menjadi tidak maksimal. Keterbatasan lainnya adalah responden yang belum seluruhnya mencakup sebagian besar yang ada besar di Kota Semarang. Selain itu kebutuhan akan pembukuan dalam bentuk yang sesuai SAK EMKM masih sangat rendah dikarenakan responden lebih menggunakan sistem pembukuan yang sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baas, T. dan M. Schrooten. 2006. Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis.

- Small Business Economics*, 27.
- Rudiantoro, Rizki dan Siregar, S.V.2012. Kualitas Laporan Keuangan UMKM dan Prospek Penerapan SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan II*(9). 1-12.
- Pinasti, M. 2001. Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bank Indonesia
- Kemendag RI, 2013. Analisis Peran Lembaga Pembiatyaan dalam Pengembangan UMKM, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.